

BAB I

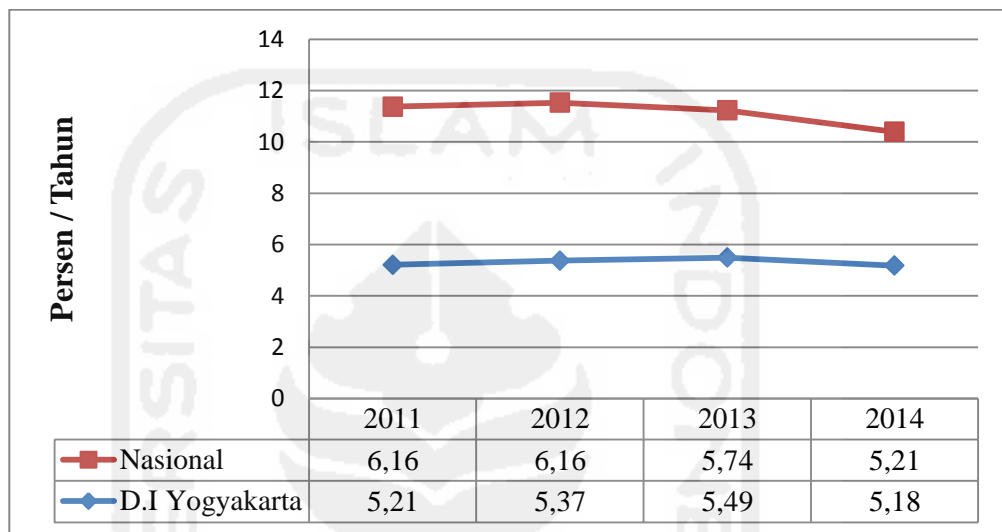
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah besar yang terjadi saat ini di negara berkembang seperti di negara Indonesia, dimana terdapat beberapa karakteristik yang ada dalam negara berkembang yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, standar hidup yang rendah, produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, angkatan kerja dengan skill rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi (Hakim, 2002). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya lapangan kerja yang memadai sedangkan laju pertumbuhan di Indonesia cukup tinggi. Dalam kondisi seperti ini harus diadakan kebijakan agar kemiskinan dan pengangguran tidak terus merajalela di Indonesia. Dengan keadaan laju pertumbuhan penduduk saat ini pemerintah harus pandai-pandai mengatasi agar laju pertumbuhan penduduk tidak hanya menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tetapi juga dapat menjadikan modal yang besar dan kuat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Seperti halnya pada Provinsi D.I Yogyakarta dapat dilihat dalam gambar 1.1, berdasarkan nilai PDRB di D.I Yogyakarta terdapat kondisi perekonomian selama kurun waktu 2012-2014 menunjukkan kinerja yang kurang baik, dimana laju pertumbuhan hanya dengan rata-rata sebesar 5,3 %, jumlah ini lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional

yang sebesar 5,90 %. Besarnya nilai PDRB Provinsi D.I Yogyakarta di Pulau Jawa merupakan terendah kedua setelah Provinsi Banten. Pada tahun 2011-2013 laju perekonomian meningkat dari 5,21 % menjadi 5,49 %, kemudian menurun di tahun 2014 dengan laju perekonomian menjadi 5,18.



Sumber : *DIY Dalam Angka 2014* BPS, Yogyakarta

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB D.I Yogyakarta 2010

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja atau jumlah lowongan pekerjaan yang ada pada dunia kerja nyata. Hal ini berarti semakin banyak pembangunan yang ada akan berpengaruh juga pada semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau banyak kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini sangat penting karena apabila kesempatan kerja banyak tersedia maka kegiatan ekonomi masyarakatnya akan semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, produktif dan dapat memberikan penghargaan serta imbalan yang layak dapat

berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tenaga kerja tidak hanya menjadi subyek penting saja dalam melakukan kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting dalam menghasilkan pendapatan yang akan memberikan daya beli pada masyarakat dan selanjutnya akan menyebabkan permintaan yang efektif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan.

Penduduk dengan jumlah yang besar sebagai Sumber Daya Manusia yang potensial serta didukung dengan adanya kekayaan alam yang melimpah adalah modal dasar untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini untuk membangun perekonomian agar lebih maju, antara Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada harus berjalan beriringan atau seimbang. Pada pihak Sumber Daya Manusia harus pandai-pandai memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam yang sangat melimpah ini agar mendapatkan hasil yang sesuai dalam rangka memajukan perekonomian.

Perluasan penyerapan tenaga kerja ini sangat diperlukan guna untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk pada usia muda yang sudah mulai ingin masuk ke dunia pekerjaan. Adanya ketidakseimbangan pada jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Dalam hal ini pada angka pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan pada sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, beban hidup masyarakat meningkat, kemiskinan menjadi sumber utamanya dan mendorong

peningkatan keresahan sosial, serta dapat mengakibatkan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang terhambat (Depnakertrans, 2004).

Tabel 1.1
Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (dalam ribu jiwa)

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata	Total
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus		
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	41.494	39.088	39.590	39.220	38.973	39.673	198.366
2	Pertambangan dan Penggalian	1.254	1.434	1.602	1.426	1.436	1.430	7.154
3	Industri	13.824	14.541	15.615	14.959	15.254	14.839	74.195
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	234	234	251	252	289	252	1.260
5	Konstruksi	5.592	6.263	6.851	6.349	7.280	6.467	32.337
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	22.492	22.297	23.515	24.105	24.829	23.448	117.242
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.619	5.006	5.0522	5.096	5.113	5.177	25.887
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.739	2.577	2.690	2.898	3.031	2.588	12.942
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	15.956	15.971	17.322	18.451	18.420	17.225	86.129
10	Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	-
11	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
12	Tak Terjawab	-	-	-	-	-	-	-
	Total	108.207	107.416	112.504	112.761	114.628	111.103	555.518

Sumber : DIY Dalam Angka 2015 BPS, Yogyakarta

Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada berbagai macam sektor usaha. Pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas paling banyak bekerja pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Hal ini

menunjukkan bahwa pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan adalah sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja yang ada. Dalam periode tahun 2010-2014 rata-rata jumlah pekerja yang terserap sebesar 39,67 juta orang. Sedangkan pada urutan kedua penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi dengan rata-rata jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang terserap sebesar 23,45 juta orang. Dan urutan ketiga terbesar terdapat pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan dengan rata-rata yang terserap sebesar 17,22 juta orang. Rata-rata penyerapan tenaga kerja terendah terdapat pada sektor Listrik, Gas, dan Air Minum dengan jumlah penduduk yang terserap sebesar 252 ribu orang.

Menurut hasil Sensus Penduduk (SP) pada tahun 2010, jumlah penduduk di Provinsi D.I Yogyakarta sebanyak 3.457.491 jiwa didapat dari hasil penjumlahan pada jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa dan nilai dari sex ratio penduduk Provinsi D.I Yogyakarta adalah sebesar 97,73. Dimana sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Kemudian berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Provinsi D.I Yogyakarta selalu mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Dimana pada tahun 2011 pertumbuhan penduduknya sebesar 0,38%, di tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan tetap sebesar 0,3% dan pada tahun 2014 pertumbuhan penduduknya turun kembali sebesar 0,29%.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk di Provinsi D.I Yogyakarta

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2010	3.457.491	
2011	3.509.997	0,38
2012	3.552.462	0,3
2013	3.594.854	0,3
2014	3.637.116	0,29

Sumber : DIY Dalam Angka 2015 BPS, Yogyakarta

Dalam ketenagakerjaan terdapat beberapa masalah yang dapat dihadapi diantaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya yang akan menyebabkan jumlah angkatan kerja juga meningkat. Peningkatan pada jumlah angkatan kerja tersebut apabila tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai, maka justru akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Dalam masalah pengangguran tersebut tentunya merupakan masalah yang sangat serius dalam bidang ketenagakerjaan karna merupakan faktor utama penyebab kemiskinan. Oleh karena itu, dalam jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan khususnya penempatan tenaga kerja sebagai salah satu modal pembangunan.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Pencari Kerja di Provinsi DIY

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2010	69.923	59.870	129.793	
2011	43.831	42.895	86.726	-9,59
2012	45.637	41.904	87.541	0,23
2013	44.398	45.020	89.418	0,53
2014	38.854	41.735	80.589	-2,56

Sumber : DIY Dalam Angka 2015 BPS, Yogyakarta

Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta yang terdapat pada buku BPS D.I Yogyakarta dalam angka tahun 2015 dapat menunjukkan bahwa dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi penurunan jumlah pencari kerja yang cukup banyak sebesar 43.067 orang. Namun pada tahun 2012 dan 2013 jumlah pencari kerja di D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 sebesar 8.829. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta pada tahun 2014 dari jumlah pencari kerja, hasil komposisi menurut jenis kelamin laki-laki 38.854 (48,21%) dan perempuan sebesar 41.735 (51,79%).

Tabel 1.4
Banyaknya Pencari Kerja yang Ditempatkan di D.I Yogyakarta

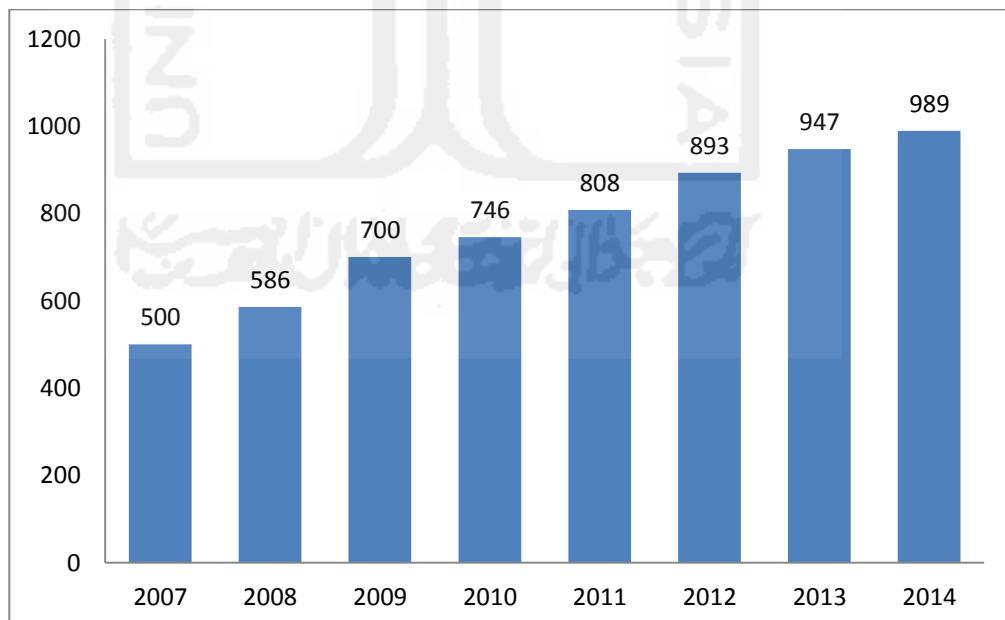
Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2010	10.135	7.805	17.940	
2011	5.798	10.161	15.959	-2,88
2012	9.757	6.153	15.910	-0,08
2013	7.726	5.082	12.808	-5,28
2014	4.102	5.194	9.296	-7,70

Sumber : DIY Dalam Angka 2015 BPS, Yogyakarta

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja yang ditempatkan atau dapat terserap di Provinsi D.I Yogyakarta selalu menurun setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang terserap di Provinsi D.I Yogyakarta menurun sebesar 7,70%. Jumlah ini lebih banyak dari pada tahun 2013 yang hanya sebesar 5,28%. Pada tahun 2014, komposisi pencari kerja yang terserap adalah

jumlah pencari kerja perempuan sebesar 5.194 (55,87%) lebih besar dibanding pencari kerja laki-laki yang terserap sebesar 4.102 (44,13%).

Dari jumlah pencari kerja yang dapat terserap di Provinsi D.I Yogyakarta, maka Gubernur D.I Yogyakarta juga telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di D.I Yogyakarta. Tujuan utama dari diadakannya penetapan UMP adalah untuk menjaga daya beli penduduk dikarenakan adanya kenaikan harga atau inflasi. Penentuan UMP itu sendiri dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan birokrat, akademisi dan serikat pekerja yang melalui survei kebutuhan hidup minimum yang dilakukan setiap tahunnya. Nilai UMP di D.I Yogyakarta diambil dari nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang terendah di D.I Yogyakarta yaitu UMK Kabupaten Gunung Kidul.



Sumber : DIY Dalam Angka 2014 BPS, Yogyakarta

Gambar 1.2 Perkembangan Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) D.I Yogyakarta, 2007-2014 (ribuan)

UMP menjadi isu yang sensitif dikalangan pekerja dikarenakan dalam kenyataannya tidak semua perusahaan mau dan mampu melakukan pembayaran upah sesuai dengan ketentuannya, sementara nilai UMP yang telah ditetapkan dikatakan masih jauh dari kebutuhan hidup minimum yang layak dari sisi kalangan pekerja. Dapat dilihat dalam gambar 1.2 dimana pada tahun 2013 UMP di Provinsi D.I Yogyakarta secara nominal hanya sebesar Rp 947.000 per bulan dan meningkat menjadi Rp 989.000 pada tahun 2014. Dilihat secara nominal dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun dilihat dari sisi KHL cenderung berfluktuasi dan sangat tergantung terhadap tingkat harga yang berlaku.

Tabel 1.5
Realisasi Investasi D.I Yogyakarta Tahun 2008-2014

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	PMA + PMDN (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	1.806.426.455.845	2.415.461.744.857	4.221.888.200.702	142.187.960.933	3,49
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	168.757.500.000	3,99
2010	1.884.923.869.797	2.696.046.957.447	4.580.972.827.244	190.327.126.542	4,33
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008	1.842.605.192.764	40,22
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759	632.488.121.751	9,85
2013	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638	1.011.703.992.879	14,338
2014	3.568.546.291.755	5.955.853.842.883	9.524.400.134.638	1.456.630.000.000	18,05

Sumber : Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY 2012-2017

Adapun keadaan investasi di D.I Yogyakarta dapat dilihat dari hasil capaian indikator kinerja terkait penanaman modal pada Tabel 1.5, Investasi

di D.I Yogyakarta tumbuh 18,05% dari tahun 2013 sebesar Rp. 8.067.770.134.638,- menjadi Rp. 9.524.400.134.638,- pada tahun 2014 yang terdiri dari PMDN Rp. 3.568.546.291.755,- dan PMA sebesar Rp. 5.955.853.842.883,-. Perusahaan yang merealisasikan investasi di D.I Yogyakarta sejumlah 218 perusahaan, yang terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA. Pada tahun 2014, lima sektor terbesar penyumbang investasi di D.I Yogyakarta, yaitu secara berturut-turut dari yang terbesar adalah Perhotelan dan Restoran, Perdagangan, Industri Tekstil, Jasa Lainnya dan Transportasi.

Capaian sasaran meningkatnya nilai investasi di D.I Yogyakarta baik PMA maupun PMDN dengan target Rp. 8.946.874.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 9.524.400.134.638,- atau sebesar 106,46% merupakan penyebab keberhasilan atau kenaikan pertumbuhan nilai investasi dari adanya perluasan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun upaya untuk peningkatan realisasi penanaman modal yaitu BKPM D.I Yogyakarta telah memfasilitasi percepatan realisasi investasi, melakukan penanganan permasalahan investasi dan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Sasaran meningkatnya nilai investasi di D.I Yogyakarta baik PMA maupun PMDN dengan besar anggaran sebesar Rp. 1.898.583.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.774.742.075,- atau sebesar (93,48%). Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan nilai investasi sebesar Rp. 1.456.630.000.000,- atau 18,05 % dari capaian realisasi nilai investasi kumulatif pada tahun 2014.

1.2.Rumusan Masalah

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana terdapat permintaan tenaga kerja oleh suatu sektor lapangan usaha sehingga penduduk yang ingin bekerja dan memenuhi syarat dalam bekerja serta mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, peningkatan pada penyerapan tenaga kerja dapat menjadikan faktor berkurangnya tingkat pengangguran.

Menurut data yang ada dalam BPS DIY dalam angka tahun 2015, banyaknya jumlah penduduk yang sedang mencari kerja di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 80.589 orang. Sedangkan banyaknya jumlah pencari kerja yang terserap di D.I Yogyakarta hanya sebesar 9.296 orang. Dalam kondisi ini masih ada sekitar 71.293 orang pencari kerja yang belum terserap, jumlah ini cukup besar walaupun pada tahun 2013 jumlah pencari kerja yang belum terserap lebih besar sebesar 76.610 orang. Terkait dalam kondisi ini, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini :

- 1) Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi D.I Yogyakarta ?
- 2) Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi D.I Yogyakarta ?
- 3) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi D.I Yogyakarta ?

- 4) Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi D.I Yogyakarta ?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian :

Tujuan Penelitian :

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta.
- 2) Menganalisis seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta.
- 3) Menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta.
- 4) Menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta.

Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak – pihak lain yang berkepentingan, yaitu bagi :

- 1) Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selain itu dari penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti berbagai macam faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta.
- 2) Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa

atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan, memperluas dan memantapkan wawasan serta ketrampilan yang dapat membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

- 3) Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan ekonomi terutama tentang ketenagakerjaan.

